

KODE Prog/ Keg		URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)		Realisasi		
			DPA	DPPA	Kau (Rp.)	%	% Fisik Keg.
1		2	3	4	5	6	7
55	48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	455.427.000,00	455.427.000,00	447.467.258,00	98,25	100,00
55	49	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	679.464.000,00	820.464.000,00	806.434.560,00	98,29	100,00
55	50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan	884.169.000,00	882.742.864,00	881.362.164,00	99,84	100,00
55	51	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	2.766.741.000,00	3.468.918.700,00	3.152.626.082,00	90,88	100,00
59		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	90.000.000,00	90.000.000,00	85.537.250,00	95,04	100,00
59	52	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	90.000.000,00	90.000.000,00	85.537.250,00	95,04	100,00
67		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	48.762.500,00	97,53	100,00
67	53	Peningkatan sistem data dan informasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	50.000.000,00	50.000.000,00	48.762.500,00	97,53	100,00

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlampir dalam formulir J-2 (pencapaian kinerja Pelayanan OPD).

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Saat ini, persoalan dalam sistem transportasi sudah terbilang kompleks. Tingginya tingkat pergerakan manusia dan barang sudah tidak lagi hanya menyangkut persoalan *supply* dan *demand*, tapi sudah masuk pada ranah politik, tata ruang, aspek sosial, teknologi dan sistem informasi serta aspek lingkungan. Sementara itu, isu-isu

yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi massal, konversi bahan bakar fosil ke gas dan *inteligensia transport management*. Dalam hal manufaktur, pada level nasional, isu yang terus didiskusikan adalah sejauh mana industri manufaktur nasional bisa memproduksi mesin-mesin yang berstandar *euro-2* dengan tingkat emisi yang relatif rendah yang terkait dengan keinginan dan rencana Pemerintah Indonesia menurunkan tingkat emisi sebesar 26% atau setara dengan 2,9 metrik kubik karbon. Di Eropa, standar mesin-mesin yang digunakan untuk sarana transportasi sudah berstandar *euro-5*.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih aktual adalah :

1. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless transport*.
2. Buruknya transportasi perkotaan menyebabkan kota-kota di Indonesia tidak efisien, memiliki kondisi lingkungan udara yang tidak sehat, kehilangan daya saing dan tidak mampu mendorong investasi dan pertumbuhan.
3. Angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha rendah dan menyebabkan rendahnya produktivitas nasional.
4. Rendahnya penggunaan angkutan umum yang diindikasikan dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi
5. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam penyelenggaraan transportasi.
6. Masih kurangnya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan laut dihadapkan pada persoalan real (nyata) berupa rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa :

1. Masih kurangnya pembangunan jalan tol;
2. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
3. Masih terbatasnya ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang memadai;

4. Masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan;
5. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
6. Masih rendahnya tingkat kelayakan kendaraan Bermotor;
7. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel;
8. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
9. Belum optimalnya pelayanan Bandar Udara Husein Sastranegara dan bandara lainnya dalam melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa Barat;
10. Masih terbatasnya fungsi Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan niaga.
11. Komoditas ekspor dan import dari dan ke Jawa Barat masih dilakukan melalui Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini mengalami keterbatasan kapasitas dan aksesibilitas, sehingga diperlukan pembangunan Pelabuhan Cilamaya dan pelabuhan lainnya untuk mendukung pergerakan orang dan barang di wilayah Jawa Barat ;
12. Tingginya pelanggaran muatan angkutan barang di Jawa Barat.

Sementara itu, pada sisi lain ada delapan (8) tantangan utama yang di hadapi pemerintah Propinsi Jawa Barat (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 – 2013) yang hingga saat ini relevan untuk ditindaklanjuti di dalam pengembangan infrastruktur wilayahnya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengembangan angkutan umum massal terutama untuk kota-kota yang berpenduduk padat;
2. Pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien, baik berupa jaringan jalan tol maupun non tol yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan utama dalam skala regional dan lokal;
3. Pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif;
4. Revitalisasi dan pengembangan jaringan jalan rel untuk melayani pergerakan dalam kota dan antarkota;
5. Pengaturan pergerakan (*traffic management*) untuk angkutan barang dan angkutan penumpang

6. Peningkatan pelayanan bandara-bandara yang telah ada dan mengembangkan bandara baru yang lebih tinggi kapasitas layanannya untuk menunjang perkembangan kegiatan perekonomian dan kegiatan-kegiatan lainnya;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan laut dan ASDP yang ada dan mengembangkan pelabuhan laut dan ASDP baru;
8. Pengembangan keterpaduan sistem transportasi dan koneksi antar moda.

Untuk menggambarkan kesesuaian antara isu-isu strategis dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut, Isu-isu strategis tersebut kemudian menjadi dasar atau acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2013-2018). Isu strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas kompetensi aparatur (sumber daya manusia /SDM) Perhubungan yang andal dan berkualitas di bidang transportasi/perhubungan;
2. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal (BRT, Kereta Api dan lain-lain) yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
3. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas jalan;
4. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
5. Belum termanfaatkannya IPTEK pada penyelenggaraan Transportasi Darat;
6. Belum terwujudnya Pembangunan pelabuhan laut Cilamaya di Jawa Barat untuk mendukung pergerakan barang dan jasa;
7. Belum terwujudnya Pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan laut pengumpan regional.
8. Belum optimalnya Pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
9. Belum terwujudnya fasilitas prasarana transportasi udara di Jawa Barat;
10. Belum terwujudnya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi.

Isu-isu di bidang transportasi tersebut masih relevan untuk dicermati sampai saat ini, mengingat persoalan transportasi di Jawa Barat belum mendapat solusi yang stabil, sehingga masyarakat mendapat pelayanan di bidang transportasi sesuai dengan cita-cita luhur undang-undang di bidang transportasi dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016**

Berdasarkan Perencanaan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat. Pembangunan Daerah Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, yang menekankan pada diversifikasi pembangunan Jawa Barat menuju pementapan pembangunan secara menyeluruh, untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasimasyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2016 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempumakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2016.

Beberapa situasi dan kondisi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 adalah : Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), PON XIX, penanggulangan kemiskinan, *Green Province* dan pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan MEA pada Tahun 2015 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap semua sektor pembangunan. Hal ini dapat dilihat salah satunya dalam pergerakan pasar tenaga kerja di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dengan semakin banyaknya tenaga kerja asing yang masuk. Oleh karena itu, sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat dalam RPJPD sebagai Provinsi Termaju Tahun 2025, maka pada Tahun 2016 Jawa Barat harus terus mempersiapkan diri untuk melaksanakan

komitmen MEA menuju : 1. *Single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal); 2. Penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM); 3. Suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program- program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI); dan 4. Integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*. Jika Jawa Barat tidak mempersiapkan diri dengan optimal terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia dan kualitas produk, maka akan berdampak negatif bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal ini akan berdampak pula pada peningkatan baik jumlah pengangguran maupun jumlah keluarga miskin yang akan menjadi beban berat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Situasi khusus lainnya yang membutuhkan perhatian dan kerjasama dari seluruh stakeholder pembangunan di Jawa Barat adalah penyelenggaraan PON XIX yang akan dilaksanakan pada tanggal 9-23 September 2016. Penyelenggaraan PON XIX Tahun 2016 ini merupakan ajang pembuktian Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan misi catur sukses dalam penyelenggaraan PON XIX yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses perekonomian rakyat dan sukses administrasi di Jawa Barat. Oleh karenanya, dukungan sumber daya untuk mencapai misi catur sukses dan target Jabar Kahiji baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat menjadi sangat penting.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif menetapkan masa depan Jawa Barat dengan skenario yang optimis menuju Jawa Barat Green Province pada tahun 2025 untuk kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma baru dalam pola pembangunan sangat diperlukan dalam menanggapi pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang tergambarkan dengan kerusakan dan perubahan fungsi ekologi, pencemaran dan bencana, akibat dari pertumbuhan penduduk, pembangunan, deplesi sumberdaya alam, krisis energi, dan perubahan iklim. Pada tahun 2016 Jawa Barat Green Province menuntut perwujudan yang lebih menyeluruh dan melibatkan berbagai aspek dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk

meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam mewadahi persebaran dan aktivitas ekonomi dan sosial penduduk.

Kemudian berlakunya perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pemerintahan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus ditindaklanjuti dengan sinkronisasi di seluruh aspek terkait.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi, serta hasil evaluasi pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yaitu:

- 1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
- 2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- 3) Perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja
- 4) Sinergitas dan pemerataan pembangunan desa-kota
- 5) Peran dan fungsi balai untuk pelayanan sosial
- 6) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Kualitas, Kuantitas, dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, air limbah, drainase, listrik, dan persampahan)
- 8) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur strategis (jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara)
- 9) Penurunan kualitas lingkungan hidup
- 10) Pengendalian dan pengawasan penataan ruang.
- 11) Kualitas demokrasi.
- 12) Ketidakberdayaan terhadap kejadian bencana
- 13) Pemerintahan yang akuntabel dan inovatif
- 14) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal.
- 15) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat.
- 16) Penanggulangan penduduk miskin.
- 17) Pasar global, *Asean – China Free Trade Area*, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- 18) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 19) Alih fungsi lahan
- 20) Ketahanan Pangan.
- 21) Keamanan dan ketertiban daerah
- 22) Pembangunan pusat seni, budaya dan stadion olahraga

- 23) Kualitas kesejahteraan Aparatur berbasis kinerja
- 24) Kebijakan pasca berlaku Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 25) Penataan Daerah Otonom Baru
- 26) Harmonisasi produk peraturan perundang-undangan daerah
- 27) Pengembangan Teknologi Informasi dalam berbagai aspek

Dengan memperhatikan berbagai isu strategis dan kebijakan strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat, maka tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 adalah : ***"Peningkatan Daya Saing Jawa Barat untuk Kemandirian dalam Persaingan Global"***

Tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2016 tersebut mengarahkan pada perumusan prioritas pembangunan di berbagai bidang pada tahun 2016 yang berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) *Common Goals*, berbasis tematik kewilayahan, dan berbasis pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Pembangunan sektoral, dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: **Pertama**, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (*strengthening lokal actor*); **Kedua**, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; **Ketiga**, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; **Keempat**, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta **Kelima**, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) *Common Goals* adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran:**

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal dasar dan menengah, dengan kegiatan tematik adalah Jabar bebas putus jenjang sekolah;
- b. Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B, dan C plus kewirausahaan, dan keaksaraan fungsional (KF), dengan kegiatan tematik



adalah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;

- c. Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif, dengan kegiatan tematik adalah Pendidikan berkebutuhan khusus;
- d. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;
- e. Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

**2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED, dan pemenuhan sumber daya kesehatan;
- b. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak;
- c. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa;
- d. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan kegiatan tematik adalah Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

**3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya;
- b. Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan;

- c. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah membangun Infrastruktur jalan dan perhubungan;
  - d. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan, dengan kegiatan tematik adalah Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;
  - e. Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan, dengan kegiatan tematik adalah Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;
  - f. Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; dan
  - g. Terwujudnya pengembangan penyediaan air baku, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih.
- 4. Meningkatkan ekonomi pertanian, dengan sasaran:**
- a. Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;
  - b. Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan agribisnis, *forest business*, *marine business*, dan agroindustri;
  - c. Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi, dengan kegiatan tematik adalah Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG, dan swasembada protein hewani;
  - d. Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat bebas rawan pangan;
  - e. Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan, dengan kegiatan tematik adalah Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan.
- 5. Meningkatkan ekonomi non pertanian, dengan sasaran:**
- a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja, dengan kegiatan tematik adalah

Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha UMKM;

- b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi, dengan kegiatan tematik adalah Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi;
- c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan skema pembiayaan alternatif;
- d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri manufaktur;
- e. Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri kreatif kreatif dan wirausahawan muda kreatif.

**6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis, dengan kegiatan tematik adalah Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%;
- b. Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu, dengan kegiatan tematik adalah Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik, dan pengelolaan sampah regional;
- c. Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan bencana longsor, gempa bumi, banjir, dan gunung api .

**7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga dengan sasaran:**

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan kepemudaan, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan;

- b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat;
- c. Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;
- d. Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;
- e. Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan destinasi wisata.

**8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana;
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengokohan Ekonomi Keluarga, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga;
- c. Meningkatnya pengelolaan kependudukan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pengelolaan kependudukan.

**9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan, dengan sasaran:**

- a. Menurunnya penduduk miskin di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengurangan kemiskinan;
- b. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
- c. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat.

**10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:**

- a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan *Good Governance*, dengan kegiatan tematik adalah Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur;
- b. Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Penataan sistem hukum dan penegakan hukum;
- d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan, dengan kegiatan tematik adalah Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak;
- e. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Akuntabilitas Pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;
- f. Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa

10 (sepuluh) *Common Goals* Prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar 2.1. sebagai berikut:



Sumber : RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Dalam RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 disebutkan bahwa Upaya peningkatan infrastruktur transportasi melalui peningkatan kinerja pengelolaan jalan provinsi. Dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.191,29 Km, berada dalam kondisi mantap sampai dengan Tahun 2014 mencapai 97,68%. Dengan capaian tersebut, maka peningkatan kemantapan jalan sudah melebihi target RPJMD 2013-2018 untuk Tahun 2014 sebesar 97,10 – 97,40%. Untuk mempertahankan kondisi jalan, dilaksanakan program pemeliharaan jalan pada semua jaringan jalan provinsi sepanjang 2.191,29 km dan pemeliharaan jembatan sepanjang 14.198 m, sedangkan untuk rehabilitasi jalan telah dilaksanakan sepanjang 74,84 km, rehabilitasi jembatan sepanjang 25 m, perbaikan badan jalan sepanjang 42,22 km, perbaikan drainase jalan sepanjang 61,33 km. Sementara melalui program pembangunan/Peningkatan jalan telah ditingkatkan jalan sepanjang 76,19 km.



**Tabel 2.10**  
**Kinerja Kemantapan Jalan Tahun 2014**

No	Kondisi	2014	
		panjang (km)	%
1	Baik	1.108,091	50,57
2	Sedang	1.032,469	47,12
	Mantap	2.140,56	97,68
3	Rusak Ringan	50,730	2,32
4	Rusak Berat	-	0
	Tidak Mantap	50,730	2,32
<b>Total</b>		<b>2.191,29</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat*

Tingkat kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) di Provinsi Jawa Barat meningkat dari 97,56% pada Tahun 2013 menjadi 97,68% pada Tahun 2014, meningkat sebesar 0,12%. Berkaitan dengan sektor perhubungan, hingga Tahun 2013-2014 telah dilaksanakan berbagai program antara lain: (a) Penyediaan fasilitas pendaratan dan penempatan pesawat yaitu pembuatan marking 4.000 m<sup>2</sup>, perluasan apron 1.500 m<sup>2</sup>, peningkatan over run 3.600 m<sup>2</sup> dan tersedianya fasilitas pendingin ruangan tower pada gedung operasional Bandara Husein Sastranegara; (b) Penyediaan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang pada jalur Cianjur-Sukabumi di Desa Titisan Kabupaten Sukabumi seluas 7.800 m<sup>2</sup> dan Jalur Sukabumi-Bandung di Desa Sindang Jaya Kabupaten Cianjur seluas 159.620 m<sup>2</sup>; (c) Pembebasan lahan Bandar Udara Internasional di Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat sampai dengan akhir Tahun 2013-2014 seluas 777,6 Ha 873,63 Ha sehingga total lahan yang tersedia ± 920,66 Ha (ditambah dengan tanah kas desa seluas 143 Ha); (d) Pembangunan Sisi Udara Bandar Udara Internasional Kertajati berupa konstruksi Runway dengan panjang 2.565 m dan lebar 60 m; (e) Pembebasan tanah untuk pembangunan shortcut Jalur Kereta Api Cibungur (Purwakarta) dan Tanjunggrasa (subang) sampai dengan akhir Tahun 2013-2014 seluas ± 22,9 19,3 Ha; dan (d) Peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Jawa Barat.

Dari proses membandingkan RKPD Tahun 2016 tersebut, tidak ditemukan perbedaan yang menyolok dalam hal usulan program/kegiatan yang telah diusulkan melalui RKPD Jabar *online* namun usulan program/kegiatan melalui RKPD Jabar online tersebut akan terus diperbarui dan disempurnakan sesuai dengan tahapan

perencanaan serta hasil forum SKPD dan sebagai catatan penting terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 adalah:

c. Untuk bidang transportasi apabila ditampilkan lebih lengkap, mengingat transportasi terdiri dari Darat, Laut dan ASDP dan Udara, yaitu:

Hingga tahun 2014 berbagai upaya program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat dalam sektor ini, antara lain :

- Sebagai gambaran dapat diinformasikan bahwa di bidang transportasi darat penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dari panjang jalan provinsi 2.199,18 km, fasilitas lalu lintas yang dapat dipenuhi sampai dengan tahun 2014 mencapai 17,02%.
- Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kereta api, pemerintah provinsi Jawa Barat berupaya mendorong terwujudnya pembangunan jalur kereta api *shortcut* Cibungur – Tanjunggrasa, pada Tahun 2014 hasil kegiatan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shotcut Kereta Api Cibungur-Tanjunggrasa adalah adanya Pembebasan lahan Desa Wanakerta seluas 5.489 m<sup>2</sup> dan Sertifikasi Tanah, Proses Pengukuran oleh Pihak Perhutani, Pangulah Selatan Kab. Karawang sudah diserahkan sebanyak 27 Sertifikat, Sedangkan untuk lokasi di 4 Kec. Di Purwakarta (Karangmukti, Cikopo, Cibodas dan Cijunti) masih dalam proses BPN. Pada Tahun 2012 lahan yang telah dibebaskan seluas **18,7974 ha**, dan pada tahun 2013 telah dimulai persiapan rencana reaktivasi jalur kereta api (Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari), melalui kegiatan penyusunan DED jalur KA Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari dan persiapan penertiban lahan dalam rangka reaktivasi jalur KA Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari;
- Untuk bidang perhubungan laut dan ASDP di Jawa Barat upaya untuk mewujudkan pembangunan pelabuhan laut cilamaya terus dilakukan, dengan menyusun Mou untuk pembagian peran yang lebih jelas antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan bidang perhubungan laut di Jawa Barat dimulai dengan kegiatan-kegiatan kajian



untuk membangun pelabuhan pengumpan regional di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, maupun pengumpan lokal di Jawa Barat. Upaya pembangunan pelabuhan tersebut terus ditindak lanjuti dengan kajian sesuai tahapan pembangunan sebuah pelabuhan laut.

- Untuk meningkatkan ketersediaan angkutan udara di Jawa Barat, pemerintah Provinsi telah berupaya berkonsentrasi mewujudkan pembangunan bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka. Pada Tahun 2014 hasil kegiatan pembebasan lahan adalah Pembebasan lahan di desa Sukakerta dan Sukamulya target 50 ha dan realisasinya 14,131 ha untuk menyelesaikan kebutuhan runway dan pembebasan tanah kas desa Kertajati dan Kertasari seluas 82,002 ha sehingga total lahan yang dibebaskan pada tahun 2014 seluas 96,133 ha serta total lahan yang dibebaskan sampai dengan tahun 2014 seluas 873,73 ha; pengukuran bidang tanah pengganti dan lanjutan pengukuran lahan sampai dengan 800 ha, Pengukuran bidang tanah untuk revisi pengukuran 1 keg, Kegiatan revisi, Sertifikasi desa Bantarjati 1 paket, dokumen Hasil tim verifikasi tanah pengganti tanah kas desa, Biaya pengukuran tanah pengganti desa Bantarjati, Kertasari, dan Kertajati kurang lebih 200 ha, terlaksanannya operasional pengukuran tanah seluas kurang lebih 800 ha.
- d. Indikator kinerja program/kegiatan dan sasaran program / kegiatan bidang Perhubungan khususnya pada BAB IV dapat lebih diperjelas dengan pertimbangan ketercapaian dan kewenangan yang dimiliki serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
- e. Program/ kegiatan yang bersifat *fixed cost* baik di kantor pusat Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan UPT/Balai diharapkan mendapatkan perhatian terlebih dahulu, program tersebut terdiri dari :
  - 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 3) Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
  - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2015 Provinsi Jawa Barat pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana terlampir dalam formulir J-3 (Review terhadap rancangan awal RKPD).

**f. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pada rencana penyelenggaraan Forum OPD Tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2015, akan mengundang unsur-unsur dari masyarakat antara lain Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA), Asosiasi Perusahaan Karoseri Indonesia (ASKARINDO), Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSINDO), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITB, LPPM Itenas, dan LPPM Unpar.

Dengan demikian hasil forum OPD tersebut diharapkan terdapat masukan, usulan, dan koreksi sehingga Forum OPD dapat menampung masukan, saran, usulan dari unsur masyarakat yang dapat lebih mempertajam usulan program/ kegiatan yang terkait bidang Perhubungan.

Selain itu masukan dari unsur masyarakat tersebut akan diterima melalui proses pelaksanaan Pra Musrenbang sesuai wilayah masing-masing maupun Musrenbang Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengumpulan informasi melalui forum OPD dan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan pra Musrenbang maupun Musrenbang, akan dilaksanakan identifikasi program/ kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan Kabupaten/ kota yang bersangkutan atau kewenangan Pemerintah pusat, ataupun kewenangan Pemerintah Provinsi dan secara teknis telah diberikan pertimbangan pada saat pembahasan. Sehingga yang merupakan kewenangan pemerintah pusat diusulkan untuk diteruskan melalui forum Musrenbangnas atau telah diusulkan melalui pembahasan RKA/ KL Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan di Yogyakarta dan yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota yang bersangkutan dipertimbangkan oleh TAPD apakah akan dialokasikan melalui Bantuan atau Belanja Tidak Langsung (BTL) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat diusulkan menjadi Belanja Langsung (BL) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

